

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnal *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure* mendefinisikan hubungan keagenan adalah : “*Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

Artinya hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang, atau lebih (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka dapat dipastikan agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Kathleen M. Eisenhardt (1989) dalam jurnal *Agency Theory : An Assesmet and Review* teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi.

Asumsi sifat manusia memfokuskan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang masa depan (*bounded rationality*) dan manusia selalu

menghindari resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi merupakan kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara principal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnal *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, adanya masalah keagenan yang memunculkan biaya agensi yang terdiri dari :

1. *The monitoring expenditures by the principal*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal guna mengawasi perilaku agen dalam mengelola perusahaan.
2. *The bonding expenditures by the agent*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin agen tidak bertindak merugikan prinsipal.
3. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal dan agen karena adanya hubungan keagenan.

2. Teori Perkembangan Moral

Perkembangan moral adalah perubahan pemikiran, emosi, dan perilaku individu yang mempengaruhi keyakinan mengenai apa yang benar dan salah. Perkembangan moral mencakup dimensi interpersonal dan intrapersonal yang mengatur cara kita berinteraksi dengan orang lain (Santrock, 2012b dalam Enie Novieastari, Kusman Ibrahim, Ns. Deswani, dan Sri Ramdaniati 2020:99).

Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg memperluas teori Kognitif Piaget, Kohlberg melakukan wawancara dengan anak-anak, remaja, dan dewasa menemukan bahwa penalaran moral berkembang secara bertahap. Dari pengukuran respons terhadap serangkaian dilema moral, Kohlberg mengidentifikasi enam tahapan dalam tiga tingkatan perkembangan moral (Kohlberg 1981) yaitu:

1. Tingkat I: Penalaran Prakonvensional (*Preconventional Reasoning*)

Penalaran prakonvensional berada pada tingkatan pramoral, dimana kemampuan kognitif masih terbatas dan pemikiran berdasarkan pada hal disukai dan kesenangan.

Tahap 1: Orientasi Hukuman dan Ketaatan (*Punishment and Obedience Orientation*)

Pada tahap pertama ini, respons anak terhadap dilema moral terjadi dalam bentuk ketaatan absolut terhadap kewenangan dan aturan.

Tahap 2: Orientasi Relativis Instrumental (*Instrumental Relativist Orientation*)

Pada tahap ini, anak mengenal adanya lebih dari satu pandangan mengenai kebenaran, guru memiliki pandangan yang berbeda dengan orang tuanya.

2. Tingkat II: Penalaran Konvensional (*Conventional Reasoning*)

Pada tingkat II, penalaran konvensional, individu memandang penalaran moral berdasarkan pada internalisasi pribadinya terhadap harapan sosial dan orang lain.

Tahap 3: Orientasi Anak Baik (*Good boy-Nice Girl Orientation*)

Individu pada tahapan ini mengharapkan penerimaan dan memenuhi harapan satu kelompok terdekatnya.

Tahap 4: Orientasi Mempertahankan Aturan Sosial (*Society-Maintaining Orientation*)

Individu pada tahapan ini memperluas fokus mereka dari suatu hubungan dengan individu lain menjadi hubungan dengan masyarakat.

3. Tingkat III: Penalaran Pascakonvensional (*Postconventional Reasoning*)

Individu menemukan keseimbangan antara hak asasi manusia dengan kewajiban dan aturan serta kebijakan masyarakat pada tingkatan penalaran pasca konvensional.

Tahap 5: Orientasi Kontrak Sosial (*Social Contract Orientation*)

Individu yang telah mencapai tahap 5 mengikuti hukum sosial namun menyadari peluang perubahan hukum untuk meningkatkan kehidupan sosial.

Tahap 6: Orientasi Prinsip Etik Universal (*Universal Ethical Principle Orientation*)

Tahap 6 mendefinisikan “benar” dengan keputusan hati nurani yang sesuai dengan prinsip etik yang dipilih sendiri Enie Novieastari, Kusman Ibrahim, Ns. Deswani, dan Sri Ramdaniati (2020:99).

3. *Fraud Triangle Theory*

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:27) istilah *fraud* merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin akuntansi, dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi forensik. Ketika meluncur di Internet, dalam sekejap kita akan memperoleh hampir satu miliar sumber yang menjelaskan makna *fraud*.

Salah satu definisi *fraud* :

“any illegal acts characterized by deceit, concealment or violation of trust. These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Frauds are perpetrated by individuals, and organizations to obtain money, property or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage”.

Definisi di atas dapat disarikan sebagai berikut.

1. *Fraud* adalah perbuatan melawan hukum.
2. Perbuatan yang disebut *fraud* mengandung :
 - a. Unsur kesengajaan;
 - b. niat jahat;
 - c. penipuan (*deception*);
 - d. penyembunyian (*concealment*);
 - e. penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*).
3. Perbuatan tersebut bertujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang/harta, jasa, tidak membayar jasa (contoh: tidak membayar jasa listrik/air/gas sepenuhnya dengan cara menyuap petugas yang mencatat meteran pemakaian listrik/air/gas), atau memperoleh bisnis (“memenangkan” tender pengadaan barang/jasa dengan cara menyuap pejabat atau menyalurkan bisnis kepada anggota keluarga atau kerabat). Theodorus M. Tuanakotta (2013:28).

Fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dalam berbagai bentuk, yang merugikan orang lain atau sekelompok orang lain Magda Siahaan, Haryono Umar dan Rahima Br. Purba (2019). *Fraud* bisa terjadi karena berbagai hal dan kemungkinan dibuat sebagai alasan untuk melakukan kecurangan akuntansi Predita Arie Ayu Putri dan Soni Agus Irwandi (2016).

Teori tentang Fraud Triangle pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey, yang merupakan seorang profesor sosiologi dan ahli kriminologi. Sewaktu menulis disertasi doktornya, ia memutuskan untuk meneliti para pegawai

yang mencuri uang perusahaan (*embezzlers*). Cressey tertarik pada embezzlers yang disebut “trust violators” atau “pelanggar kepercayaan”, yakni mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada mereka. Penelitiannya diterbitkan dengan judul *Other People’s Money: A Study in the Sosial Psychology of Embezzlement*. Hipotesisnya ialah:

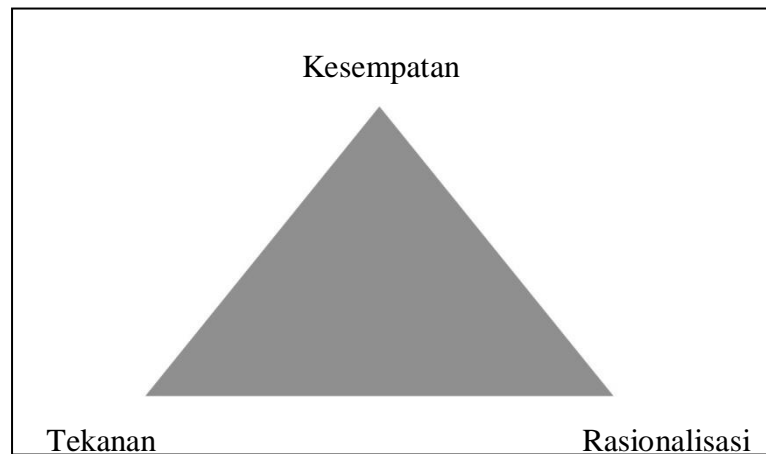
“Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds of property.

Terjemahan:

Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-harinya memungkinkannya menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan Theodorus M. Tuanakotta (2013:45).

Gambar Fraud Triangle sebagai berikut :

Gambar 2.1
Fraud Triangle



Menurut Cressey dalam *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris* (2014:15-21), penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu :

1. Insentif atau dorongan untuk melakukan perbuatan *fraud* (pressure)

Faktor pendorong munculnya motif ini adalah karena adanya kebutuhan keuangan, gaya hidup, serta tekanan pihak lain yang menyebabkan seseorang terdorong melakukan tindakan *fraud*.

2. Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*)

Faktor pendorong munculnya motif peluang yakni lemahnya sistem pengendalian internal, kepercayaan terhadap tugas seseorang yang terlalu luas dan berlebihan, minimnya pelatihan dan supervisi, kurangnya tuntutan

untuk pelaku kecurangan, ketidakefektifan program dan kebijakan anti *fraud*, serta lemahnya budaya etis.

3. Adanya tindakan merasionalisasikan perbuatan *fraud* (*rationalization*)

Rasionalisasi merupakan tindakan mencari pembenaran sebelum melakukan tindakan kecurangan di mana pembenaran tersebut digunakan sebagai motivasi untuk melakukan kejahatan Dien Noviany Rahmatika (2014:15-21).

4. Efektivitas Pengendalian Internal

4.1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh, memberikan kesan atau menimbulkan akibat, manjur, membawa hasil dan suatu keberhasilan atas tindakan atau usaha yang dilakukan. Efektivitas kegiatan *operational* perusahaan dapat dilihat dari tercapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan.

Menurut Rahmat Hidayat Lubis & Ratna Sari Dewi (2020:174) Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan, dalam kategori berikut: 1. Keandalan pelaporan keuangan, 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 3. Efektivitas dan efisiensi operasi, sedangkan menurut Abul Halim dalam Nur Lazimatul Hilma Solehah, Parmin Ishak, dan Zulfaidah (2014:34) struktur pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis, bervariasi dan memiliki tujuan utama :

1. Menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas
2. Menjaga efektif dan efisiensi operasi yang dijalankan
3. Menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dalam hal menjaga keandalan laporan keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas pengendalian internal dapat berperan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi (*fraud*) di perusahaan.

4.2. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut James A. Hall (2007:181) sistem pengendalian internal (*internal control system*) terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya :

1. Menjaga aktiva perusahaan
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen

4.3. Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dijelaskan dalam SAS 78 terdiri atas lima komponen : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan aktivitas pengendalian James A. Hall (2007:186-194).

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian (*control enviroment*) adalah dasar dari empat komponen pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian menentukan arah perusahaan dan memengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan. Berbagai elemen penting dari lingkungan pengendalian adalah :

- A. Integritas dan nilai etika manajemen
- B. Struktur organisasi
- C. Keterlibatan dewan komisaris dan komite audit, jika ada
- D. Filosofi manajemen dan siklus operasionalnya
- E. Prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan otoritas
- F. Metode manajemen untuk menilai kinerja
- G. Pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pemerintah
- H. Kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola sumber daya manusianya

2. Penilaian Resiko

Perusahaan harus melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan laporan keuangan. Resiko dapat muncul atau berubah berdasarkan berbagai kondisi, seperti :

- A. Perubahan dalam lingkungan operasional yang membebankan tekanan baru atau perubahan tekanan atas perusahaan

- B. Personel baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal
 - C. Sistem informasi baru atau yang baru direkayasa ulang, yang memengaruhi pemrosesan transaksi
 - D. Pertumbuhan signifikan dan cepat yang menghambat pengendalian internal yang ada
 - E. Implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem informasi yang berdampak pada pemrosesan transaksi
 - F. Pengenalan lini produk atau aktivitas baru sehingga pihak manajemen hanya memiliki sedikit pengalaman tentangnya
 - G. Restrukturisasi organisasional yang menghasilkan pengurangan dan/atau realokasi personel sedemikian rupa sehingga operasi bisnis dan pemrosesan transaksi terpengaruh
 - H. Memasuki pasar asing yang berdampak pada operasional, (contohnya, risiko yang berhubungan dengan transaksi dengan mata uang asing)
 - I. Adopsi suatu prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pembuatan laporan keuangan.
3. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi akuntansi (SIA) terdiri atas berbagai *record* dan metode yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan serta untuk menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait di dalamnya. Kualitas suatu informasi yang dihasilkan oleh SIA berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk mengambil tindakan serta membuat keputusan dalam hubungannya dengan operasional perusahaan, serta

membuat laporan keuangan yang andal. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan :

- A. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid
- B. Memberikan informasi secara tepat waktu mengenai berbagai transaksi dalam perincian yang memadai untuk memungkinkan klasifikasi serta laporan keuangan
- C. Secara akurat mengukur nilai keuangan berbagai transaksi agar pengaruhnya dapat dicatat dalam laporan keuangan
- D. Secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu terjadinya.

4. Pengawasan

Pihak manajemen harus memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi seperti yang dimaksudkan. Pengawasan (*monitoring*) adalah proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal serta operasinya berjalan. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa prosedur terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan.

5. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang berbeda : pengendalian komputer dan pengendalian fisik.

A. Pengendalian komputer

Pengendalian komputer adalah hal yang penting. Pengendalian ini, yang secara khusus berhubungan dengan lingkungan IT dan audit IT, terbagi ke dalam dua kelompok umum : pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum (*general control*) berkaitan dengan perhatian pada keseluruhan perusahaan, seperti pengendalian atas pusat data, basis data perusahaan, pengembangan sistem, dan pemeliharaan program. Pengendalian aplikasi (*application control*) memastikan integritas sistem tertentu seperti aplikasi pemrosesan pesanan penjualan, utang usaha, dan aplikasi penggajian.

B. Pengendalian fisik

Jenis pengendalian ini terutama berhubungan dengan aktivitas manusia yang digunakan dalam sistem akuntansi. Aktivitas ini dapat benar-benar manual, seperti penjagaan aktiva secara fisik, atau dapat melibatkan penggunaan komputer untuk mencatat berbagai transaksi atau pembaruan akun. Pembahasan mengenai hal ini akan berkaitan dengan enam kategori aktivitas pengendalian fisik : otorisasi transaksi, pemisahan fungsi, supervisi, pencatatan akuntansi, pengendalian akses, dan verifikasi independen.

1. Orientasi Transaksi

Tujuan dari orientasi transaksi (*transaction authorization*) adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen. Orientasi dapat bersifat umum atau khusus. Orientasi umum diberikan pada para personel operasional untuk melakukan operasi rutin. Contoh otorisasi umum adalah prosedur untuk mengesahkan pembelian persediaan dari pemasok yang ditunjuk hanya ketika tingkat persediaan jatuh pada

titik pemesanan ulang yang ditetapkan. Ini disebut sebagai *prosedur terprogram* (tidak selalu berarti terkomputerisasi) di mana aturan keputusan ditentukan terlebih dahulu, dan tidak dibutuhkan persetujuan tambahan. Di pihak lain, otorisasi khusus berkaitan dengan keputusan situasional yang berhubungan dengan transaksi nonrutin. Contoh dari hal ini adalah keputusan untuk memperbesar batas kredit pelanggan di atas jumlah normal. Otorisasi khusus biasanya adalah tanggung jawab pihak manajemen.

2. Pemisahan tugas

Salah satu aktivitas pengendalian yang paling penting adalah pemisahan tugas karyawan untuk meminimalkan fungsi yang tidak boleh disatukan. Pemisahan tugas (*segregation of duties*) dapat berupa berbagai bentuk, tergantung pada berbagai kewajiban tertentu yang akan dikendalikan. Akan tetapi, tiga tujuan berikut ini memberi petunjuk umum yang dapat diterapkan di kebanyakan perusahaan.

Tujuan 1. Pemisahan tugas harus sedemikian rupa sehingga otorisasi untuk transaksi terpisah dari pemrosesan transaksi tersebut. Contohnya, pembelian seharusnya tidak boleh dilakukan oleh departemen pembelian sehingga diotorisasi oleh departemen pengendalian persediaan. Pemisahan pekerjaan ini adalah pengendalian untuk mencegah pembelian persediaan yang tidak dibutuhkan oleh berbagai individu.

Tujuan 2. Tanggung jawab pemeliharaan aktiva harus dipisahkan dari tanggung jawab pencatatan. Contohnya, departemen yang memiliki penjagaan fisik atas persediaan barang jadi (gudang) seharusnya tidak membuat catatan persediaan resmi. Akuntansi untuk persediaan barang jadi dilakukan oleh pengendalian persediaan, yaitu sebagai

salah satu fungsi akuntansi. Ketika seseorang atau sebuah departemen memiliki tanggung jawab atas penjagaan aktiva dan pencatatan, maka akan ada potensi penipuan. Aktiva dapat dicuri atau hilang, dan catatan akuntansi dipalsukan untuk menutupi kejadian tersebut.

Tujuan 3. Perusahaan harus distrukturisasi sehingga penipuan akan membutuhkan adanya kolusi antara dua atau lebih yang memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disatukan. Contohnya, tidak ada seorang pun yang memiliki akses yang memadai ke catatan akuntansi untuk melakukan penipuan. Jadi, jurnal, buku pembantu, dan buku besar dicatat secara terpisah. Bagi kebanyakan orang, pemikiran untuk mendekati karyawan lain dengan maksud berkolusi melakukan penipuan akan menghadirkan hambatan psikologis yang besar. Ketakutan ditolak dan tindakan disipliner selanjutnya akan menyurutkan tawaran seperti ini. Akan tetapi, ketika beberapa karyawan dengan pekerjaan yang tidak bisa disatukan bekerja sama sehari-harinya ditempat yang berdekatan, kedekatan satu sama lain akan cenderung mengikis hambatan ini. Oleh karenanya, pemisahan pekerjaan yang tidak dapat disatukan harus dilakukan secara fisik serta organisasional. Bahkan, perhatian mengenai kedekatan pribadi dalam pekerjaan adalah pembenaran untuk membuat peraturan yang melarang nepotisme.

3. *Supervisi*

Mengimplementasikan pemisahan tugas secara memadai mensyaratkan agar perusahaan memperkerjakan karyawan dalam jumlah yang cukup banyak. Mencapai pemisahan fungsi yang memadai sering kali menimbulkan kesulitan bagi perusahaan kecil. Jelas, tidak mungkin untuk memisahkan lima pekerjaan yang tidak dapat disatukan ke tiga karyawan. Oleh karenanya, dalam perusahaan

kecil atau dalam berbagai area fungsional yang kekurangan personel, pihak manajemen harus menyeimbangkan ketidakberadaan pengendalian pemisahan melalui supervisi (*supervision*) yang ketat. Untuk alasan inilah, supervisi sering kali disebut sebagai *pengendalian penyeimbang (compensating control)*.

4. Catatan akuntansi

Catatan akuntansi (*accounting records*) perusahaan terdiri atas dokumen sumber, jurnal, dan buku besar.

5. Pengendalian akses

Tujuan dari pengendalian akses (*access control*) adalah untuk memastikan bahwa hanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan. Akses tidak sah akan mengekspos aktiva ke penyalahgunaan, kerusakan, dan pencurian. Oleh karenanya, pengendalian akses memainkan bagian penting dalam menjaga aktiva. Akses ke aktiva dapat secara langsung atau tidak langsung. Peralatan keamanan fisik, seperti kunci, lemari besi, pagar, dan sistem alarm elektronik serta infra merah, akan mengendalikan akses langsung. Akses tidak langsung ke aktiva berwujud akses ke catatan dan dokumen yang mengendalikan penggunaan, kepemilikan, dan pengaturan aktiva.

6. Verifikasi independen

Prosedur verifikasi (*verification procedure*) adalah pemeriksaan independen sistem akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan kesalahan penyajian. Verifikasi berbeda dari supervisi karena terjadi setelah fakta, oleh seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi atau pekerjaan yang diverifikasi. Supervisi dilakukan ketika

aktivitas sedang berjalan, oleh seseorang supervisor yang memiliki tanggung jawab langsung atas pekerjaan tersebut. Melalui prosedur verifikasi independen, pihak manajemen dapat mengakses (1) kinerja individu, (2) integritas sistem pemrosesan transaksi, dan (3) kebenaran data yang terdapat dalam catatan akuntansi. Contoh verifikasi independen meliputi :

- A. Rekonsiliasi total *batch* pada titik-titik tertentu selama pemrosesan transaksi
- B. Membandingkan aktiva fisik dengan catatan akuntansi
- C. Rekonsiliasi berbagai akun buku pembantu dengan akun pengendalinya
- D. Mengkaji laporan manajemen (baik yang dihasilkan oleh komputer maupun secara manual) yang meringkas berbagai aktivitas bisnis.

Waktu verifikasi tergantung pada teknologi yang digunakan dalam sistem akuntansi dan pekerjaan yang dikaji. Verifikasi dapat terjadi beberapa kali dalam satu jam atau beberapa kali dalam sehari. Dalam beberapa situasi, verifikasi dapat terjadi harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.

5. Ketaatan Aturan Akuntansi

5.1. Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ketaatan adalah suatu sikap mengikuti aturan atau perintah yang telah ditetapkan, dan aturan adalah semua tindakan atau perbuatan yang harus dituruti dan dijalankan. Setiap lembaga biasanya memiliki pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan

berbagai aktivitas di dalam perusahaan, salah satunya adalah aturan akuntansi mengenai aktivitas akuntansi (Simbolon Erwinto, Adji Suratman, Hendri 2019).

Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi tersebut terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi yang digunakan berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Ardiana Peni Rahmawati (2012).

Oleh karena itu, Ketaatan Aturan Akuntansi adalah suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi semua aturan akuntansi atau kewajiban yang ditentukan ketika melakukan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi efektif, andal, dan akurat. Aturan Akuntansi tersebut dibuat agar menghindari tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi.

5.2. Indikator Ketaatan Aturan Akuntansi

Siti Thoyibatun (2009) menyebutkan beberapa indikator pengukuran Ketaatan Aturan Akuntansi adalah :

1. Persyaratan Pengungkapan

Persyaratan pengungkapan menjelaskan bahwa setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen.

2. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik atau pemilik Melalui laporan keuangan dan kinerja suatu entitas akuntansi menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi publik jika dengan itu pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas.

3. Objektif

Prinsip objektif mengharuskan pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja untuk bersikap jujur secara intelektual yang berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan tersebut harus menggambarkan dengan jujur seluruh transaksi atau peristiwa lainnya yang terjadi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, bersikap adil atau tidak memihak satu pihak tertentu yang berarti informasi dalam laporan keuangan dan laporan kinerja harus diarahkan kepada kebutuhan para pemakainya dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan satu pihak tertentu, tidak berprasangka atau bias dan bebas dari konflik kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain yang berarti bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja tersebut tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu karena adanya konflik kepentingan di mana satu pihak memiliki kepentingan yang berlawanan atau berbeda.

Dengan demikian prinsip objektif harus dipertahankan dalam membuat laporan keuangan dan laporan kinerja agar laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, handal dan lebih relevan bagi penggunanya.

4. Memenuhi syarat kehati-hatian

Pembuat laporan keuangan harus memiliki tanggung jawab dengan kompetensi, ketekunan dan kehati-hatian. Kehati-hatian tersebut berarti bahwa pembuatan laporan keuangan dan laporan kinerja harus mempunyai

kewajiban untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar hasil dari laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, handal dan lebih relevan bagi penggunanya.

5. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

Konsep konsisten penyajian menjelaskan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan dan laporan kinerja antar periode konsisten.

6. Kesesuaian Kompensasi

6.1. Pengertian Kesesuaian Kompensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesesuaian adalah perihal sesuai, keadaan cocok dan selaras. Kesesuaian juga merupakan keadaan dimana merasa cocok atau pas dengan apa yang kita didapatkan. Penerapan kesesuaian disini mengacu pada tingkat kepuasan karyawan dalam perusahaan.

Menurut Werther dan Davis (1982) (dalam Kadarisman (2012:1) kompensasi adalah apa yang seorang karyawan/pegawai/pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya baik upah per jam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Kompensasi yang sesuai diharapkan mampu mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindak kecurangan. Kompensasi yang sesuai dapat mengurangi tekanan untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi Erly Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, Abdul Hamid (2020:205).

Menurut Rivai (2009:78) dalam Nizamuddin (2020:143) mengemukakan bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Secara garis besar program kompensasi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berdasarkan bentuk kompensasi dan cara pemberiannya, berdasarkan bentuknya kompensasi dibagi atas

kompensasi *finansial* (*financial compentation*) dan kompensasi *non finansial* (*non-financial compentation*), sedangkan menurut cara pemberiannya kompensasi dapat dibagi dua yaitu kompensasi langsung (*direct compentation*) dan kompensasi tidak langsung (*indirect compentation*).

Kompensasi yang diberikan organisasi ada yang berbentuk uang, namun ada yang tidak berbentuk uang. Kompensasi yang diterimakan kepada karyawan cenderung untuk menentukan standar hidup serta kedudukan sosial di masyarakat. Pentingnya kompensasi bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kinerjanya Erly Ridho Kismawadi, Uun Dwi Al Muddatstsir, Abdul Hamid (2020:205).

6.2. Tujuan Pemberian Kompensasi

Tujuan organisasi memberikan kompensasi kepada karyawannya, adalah :

1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas

Dalam upaya menarik calon karyawan, organisasi harus merangsang mereka dengan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dari organisasi lain.

2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Kompensasi yang kompetitif mencegah tingginya tingkat perputaran kerja karyawan dan kasus pembajakan karyawan oleh organisasi lain.

3. Menjamin keadilan

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan. Dengan pengikat pekerjaan, sebagai balas jasa organisasi atas apa yang sudah diabdikan karyawan

kepada organisasi, keadilan dalam pemberian kompensasi mutlak dipertimbangkan.

4. Perubahan sikap dan perilaku

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan serta memengaruhi produktivitas kerja. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif.

5. Efisiensi biaya

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan upah yang kompetitif, organisasi dapat memperoleh keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistematis, organisasi dapat membayar kurang (*underpay*) atau lebih (*overpay*) kepada para karyawannya.

6. Administrasi legalitas

Dalam administrasi kompensasi, batasan legalitas diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya adalah agar organisasi tidak sewenang-wenang memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan Agung Triharso (2012:56).

6.3. Komponen-Komponen Kompensasi

Menurut (Mondy,2008) dalam Onita Sari Sinaga (2020:37), komponen-komponen program kompensasi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kompensasi Finansial, berwujud sejumlah uang kartal untuk karyawan, umumnya terbagi atas dua bagian, yakni :

- a. Kompensasi Finansial Langsung, yaitu berupa pendapatan yang akan diterima seseorang karyawan seperti upah, gaji, bonus, serta komisi.
 - b. Kompensasi Finansial Tidak Langsung, yaitu segala pendapatan finansial yang meliputi cuti berbayar, cuti sakit, liburan, dan BPJS Kesehatan.
2. Kompensasi Non Finansial, Berupa kompensasi yang diterima oleh karyawan tertentu dari pekerjaannya atau dari lingkungan yang bersifat fisik maupun mental tempat karyawan tersebut bekerja. Aspek non finansial tersebut terdiri dari faktor-faktor yang bersifat fisik dan mental dalam lingkungan kerja suatu perusahaan tersebut.

6.4. Asas-Asas Pemberian Kompensasi

Luis Marnisah (2019:118-122) menjelaskan asas-asas yang terdapat dalam kompensasi (*inducement*), antara lain :

1. Asas Keadilan

Teori keadilan (*equity theory*) menyatakan bahwa kompensasi (*inducement*) harus diciptakan karena penting bagi manusia. Karena dalam teori keadilan individu-individu menentukan apakah mereka telah diperlakukan adil secara wajar, dengan membandingkan rasio masukan/keluaran orang lain. Ketidakadilan secara logis tentu bukan merupakan kepuasan pegawai. Pegawai mengharapkan keadilan dalam pemberian kompensasi (*inducement*) dan organisasi dapat menggunakan kompensasi (*inducement*) yang adil untuk meningkatkan motivasi pegawai. Keadilan adalah keseimbangan antara masukan-masukan yang dibawa individu dalam sebuah sistem kepegawaian dengan hasil-hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut.

2. Asas Layak dan Wajar

Pekerja/buruh merupakan sumber daya penting bagi perusahaan karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, kompensasi yang di dapatkan pekerja/buruh harus dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku.

7. Moralitas Individu

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, cet.1 Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 8 dalam Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin (2020:59). Senada dengan pengertian tersebut, W. Poespoprodjo dalam Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin (2020:59) mendefinisikan moral sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia.

Menurut Ujang Permana (2019:114-115) Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seseorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin belajar, rajin ibadah, dan lain-lain. Moralitas ini muncul dari dalam, bukan karena dipaksa dari luar. Bahkan, dalam situasi amoral yang terjadi diluar dirinya, seseorang yang memiliki moralitas individu kuat akan tidak terpengaruh. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial,

sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah.

8. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

8.1. Pengertian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini :
 - A. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan
 - B. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan
 - C. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa

yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Abdul Halim (2003) kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan, atau mengelabui dan cara tidak jujur lainnya. Kecurangan sebagian besar dapat merugikan orang lain, perusahaan, Negara, maupun diri sendiri.

Dari perspektif *criminal*, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Geis dan Meier (1997) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha diantaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak serta kebangkrutan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) adalah keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset Nur Lazimatul Hilma Solehah, Parmin Ishak, dan Zulfaidah (2020:18-20).

8.2. Tipe-Tipe Kecurangan Akuntansi

Menurut Amin Widjaja (2013) dalam Ananda (2014) terdapat dua tipe kecurangan akuntansi yaitu :

1. Kecurangan Eksternal

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah.

2. Kecurangan Internal

Tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manager dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu sendiri Nur Lazimatul Hilma Solehah, Parmin Ishak, dan Zulfaidah (2020:20-21).

8.3. Skema Kecurangan Akuntansi

Skema-skema kecurangan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Hall Singleton (2007) menjelaskan terdapat tiga kategori skema kecurangan yaitu :

1. Kecurangan dalam laporan keuangan (kecurangan oleh pihak manajemen)

Kecurangan dalam laporan keuangan dikaitkan dengan kecurangan oleh pihak manajemen. Walaupun semua kecurangan melibatkan suatu bentuk kesalahan penyajian keuangan, untuk dapat digolongkan sebagai skema kecurangan jenis ini, laporan harus memberikan manfaat keuangan langsung atau tidak langsung bagi pelakunya. Dengan kata lain, laporan tersebut bukan sebagai kendaraan untuk menyamarkan atau menutupi suatu tindakan curangan. Contohnya skema kecurangan ini adalah dengan menyatakan terlalu rendah kewajiban untuk dapat menyajikan gambaran keuangan perusahaan yang baik agar harga saham naik.

2. Korupsi

Korupsi (*corruption*) mungkin adalah kejahatan kerah putih yang paling tua. Korupsi meliputi penyuapan, konflik kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Korupsi adalah tindakan seorang pejabat atau petugas yang secara tidak sah dan tidak dapat dibenarkan memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan melanggar kewajiban dan hak. Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, korupsi merupakan 10% dari seluruh kasus kecurangan di tempat kerja dan 90% kerugian akibat korupsi ditimbulkan dari skema penyuapan.

a. Penyuapan

Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan untuk menerima berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang pejabat dalam melakukan kewajiban sahnya. Para pejabat disini dapat dipekerjakan oleh berbagai lembaga pemerintah (atau pihak yang berwenang) atau perusahaan swasta.

b. Tanda terima kasih yang tidak sah

Tanda terima kasih yang tidak sah (*illegal gratuity*) melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan untuk menerima sesuatu yang bernilai karena telah melakukan tindakan yang resmi, tindakan ini hampir sama dengan penyuapan, tetapi transaksinya terjadi setelah tindakan resmi tersebut dilakukan.

c. Konflik kepentingan

Setiap perusahaan harus mengharapkan karyawannya akan melakukan pekerjaan dengan cara yang dapat memenuhi berbagai kepentingan perusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang karyawan

bertindak atas nama pihak ketiga dalam melakukan pekerjaannya atau memiliki kepentingan pribadi dalam pekerjaannya yang dilakukan. Jika konflik kepentingan karyawan tidak diketahui oleh perusahaan dan mengakibatkan kerugian keuangan, maka telah terjadi kecurangan.

d. Pemerasan secara ekonomi

Pemerasan secara ekonomi adalah penggunaan (atau ancaman untuk melakukan) tekanan (termasuk sanksi ekonomi) terhadap seseorang atau perusahaan, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Istilah berharga dapat berupa aset keuangan atau ekonomi. Informasi atau kerja sama untuk mendapatkan keputusan yang berguna mengenai sesuatu yang sedang dipermasalahkan.

3. Penyalahgunaan aset (kecurangan oleh karyawan)

Bentuk skema kecurangan yang paling umum melibatkan beberapa bentuk penyalahgunaan aset. 85% dari kecurangan yang dimasukkan dalam penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* masuk dalam kategori ini. Aset dapat disalahgunakan secara langsung atau tidak langsung demi keuntungan si pelaku. Transaksi yang melibatkan kas, akun cek, persediaan, peralatan, perlengkapan, dan informasi adalah yang paling rentan disalahgunakan. Contoh skema kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan aset yaitu :

a. Pembebanan ke akun beban

Pencurian aset menimbulkan ketidakseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi (aset = kewajiban) yang harus disesuaikan oleh si pelaku kejahatan jika ingin pencurian tersebut tidak terdeteksi. Cara paling umum untuk menyembunyikan ketidakseimbangan adalah

membebankan aset ke akun beban dan mengurangi ekuitas dalam jumlah yang sama.

b. Gali lubang tutup lubang (*lapping*)

Lapping melibatkan penggunaan cek dari para pelanggan, menerima pembayaran rekening mereka, untuk menutupi kas yang sebelumnya telah dicuri oleh seorang karyawan Nur Lazimatul Hilma Solehah, Parmin Ishak, dan Zulfaidah (2020:24-27).

8.4. Indikator Pengukuran Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Wilopo (2006) menyebutkan beberapa indikator pengukuran kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu :

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya.

Manajemen cenderung akan melakukan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti manipulasi bukti-bukti transaksi biasanya dengan mengubah besarnya jumlah yang sebenarnya atau mengabaikan aturan akuntansi yang berlaku dalam proses penyusunannya, memalsukan dokumen-dokumen pendukung, dan merubah catatan jurnal akuntansi terutama dilakukan pada saat mendekati akhir periode. Hal-hal tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan.

2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilang peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan.

Manajemen secara sengaja melakukan salah saji dengan menghilangkan atau mengabaikan suatu peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan

dalam laporan keuangan yang dapat memperdayai pengguna laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan manajemen untuk memenuhi tujuan laba.

3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi secara sengaja. Untuk memaksimalkan laba manajemen dapat berbuat curang dengan sengaja menerapkan prinsip akuntansi yang salah seperti mengubah asumsi yang terkait dengan pencatatan jumlah, klasifikasi dan pelaporan pada transaksi keuangan.
4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima.

Manajemen dapat melakukan salah saji yang berasal dari penyalahgunaan atau penggelapan aktiva dengan melakukan rekayasa dalam laporan keuangan untuk menutup-nutupi pencurian aktiva tersebut dan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Karena adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu pihak instansi akan berusaha menutupi masalah tersebut dengan melakukan tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Cara yang dilakukan dapat berupa manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung laporan keuangan serta menghilangkan, memajukan atau menunda pencatatan transaksi yang seharusnya dilaporkan dalam periode laporan keuangan. Tindakan kecurangan tersebut dapat menyangkut satu atau lebih

individu baik manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Dan akibat dari tindakan kecurangan tersebut laporan keuangan yang disajikan pun akan salah dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku Nur Lazimatul Hilma Solehah, Parmin Ishak, dan Zulfaidah (2020:28-30).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan Made Dwi Kusuma Yadnya, Ni Kadek Sinarwati, dan Gede Adi Yuniarta (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Wulan Riyadi (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perumda BPR Majalengka. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Yully Novikasari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh moralitas individu, sistem pengendalian intern pemerintah, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dengan responden berjumlah 58 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu, sistem pengendalian intern pemerintah, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ni Nyoman Suwarianti dan Ni Komang Sumadi (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) pada Koperasi Se-Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Fani Maretta Putri dan Vita Fitria Sari (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada mahasiswa S1 jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang menerima kompensasi yang tidak sesuai akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan individu yang menerima kompensasi yang sesuai, dan individu yang berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal lebih cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu yang memperoleh kompensasi yang tidak sesuai pada kondisi ada pengendalian internal.

Roslina (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Sumigita Jaya di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Emmi Suryani dan Tafiani Manunduri (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ayu Wulansari, Rispantyo, dan Djoko Kristianto (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Astri Ainun Cendani (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Bappeda Kota Makassar (Studi Kasus SKPD Kota Makassar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tia Radhiah (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Kasus Pada PT. POS Indonesia KCU Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Viola Syukrina E. Janros dan Septenus Zembua (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Bank Cimb Niaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Rista Wahyuni (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Anak Agung K. Finty Udayani dan Maria M. Ratna Sari (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal, dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Made Dwi Kusuma Yadnya, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta (2017) Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada KSP Kecamatan Buleleng)	Variabel Independen : Moralitas Individu, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan (Fraud)	Pengaruh moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>), efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>), ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>)
2.	Wulan Riyadi (2021) Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi	Variabel Independen : Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi	Pengaruh pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan

	Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perumda BPR Majalengka	Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3.	Yully Novikasari (2017) Pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi	Variabel Independen : Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4.	Ni Nyoman Suwarianti dan Ni Komang Sumadi (2020) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>) Pada Koperasi Se-Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan	Variabel Independen : Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>)	Pengaruh kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
5.	Fani Maretta Putri dan Vita	Variabel Independen :	Pengaruh individu yang

	Fitria Sari (2019) Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang	Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	menerima kompensasi yang tidak sesuai akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan individu yang menerima kompensasi yang sesuai, dan individu yang berada pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal lebih cenderung melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan dengan individu yang memperoleh kompensasi yang tidak sesuai pada kondisi ada pengendalian internal
6.	Roslina (2016) Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompenasisi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada PT. Sumigita Jaya di Pekanbaru	Variabel Independen : Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompenasisi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompenasisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
7.	Emmi Suryani dan Tafiani Manunduri (2020) Pengaruh Pengendalian Internal Dan	Variabel Independen : Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompenasisi	Pengaruh pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif terhadap

	Kesesuaian Kompenasisi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh	Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompenasisi secara parsial berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
8.	Ayu Wulansari, Rispantyo, dan Djoko Kristianto (2019) Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompenasisi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Variabel Independen : Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompenasisi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompenasisi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
9.	Astri Ainun Cendani (2020) Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Bappeda Kota Makassar (Studi Kasus SKPD Kota Makassar)	Variabel Independen : Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
10.	Tia Radhiah (2016) Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompenasisi, Dan Moralitas Individu Terhadap	Variabel Independen : Efektifitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompenasisi, Dan Moralitas Individu	Pengaruh efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian

	Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. POS Indonesia KCU Kota Pekanbaru)	Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	kompenasasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
11.	Viola Syukrina E. Janros dan Septenus Zembua (2019) Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Bank Cimb Niaga	Variabel Independen : Keefektifan Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
12.	Rista Wahyuni (2016) Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Variabel Independen : Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

13.	Anak Agung K. Finty Udayani dan Maria M. Ratna Sari (2017) Pengaruh Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan akuntansi.	Variabel Independen : Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Variabel Dependen : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Pengaruh pengendalian internal, berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
-----	--	---	---

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pengendalian internal yang efektif dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi atau mencegah tindak kecurangan yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi. Pengendalian internal (*internal control*) menurut Dasaratha V. Rama/Frederick L. Jones (2008:132) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut : efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kecenderungan kecurangan akuntansi bisa terjadi pada sebuah perusahaan yang pengendalian internalnya tidak dijalankan dengan efektif. Untuk menutup peluang terjadinya kecurangan akuntansi, perusahaan dapat menerapkan pengendalian secara efektif.

H1: Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

2. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Siti Thoyibatun (2012) menjelaskan Ketaatan Aturan Akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh IAI, SAK, dan PSAK. Perusahaan akan melakukan tindak kecurangan kerana perusahaan tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila

perusahaan mentaati aturan akuntansi yang berlaku, maka dapat menurunkan tingkat kecenderungan akuntansi.

H2: Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

3. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Kompensasi merupakan sesuatu yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang dalam sebuah perusahaan. Bagi karyawan, kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi perusahaan atau pemerintah, kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan kinerja. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan secara matang dalam pemberian kompensasi.

Kecurangan yang dilakukan seseorang dikarenakan oleh hasrat untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, tindakan tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh atas apa yang sudah mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu sejahtera, sehingga individu tidak memiliki keinginan untuk melakukan kecurangan akuntansi yang dapat merugikan perusahaan.

H3: Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

4. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Lawrence Kohlberg (1969) dalam Enie Novieastari, Kusman Ibrahim, Ns. Deswani, dan Sri Ramdaniati (2020:99) menyatakan bahwa ada tiga tingkatan dalam tiga tingkatan perkembangan moral yaitu, tingkat I : Penalaran Prakonvensional (*Praconventional Reasoning*), tingkat II : Penalaran

Konvensional (*Conventional Reasoning*), tingkat III : Penalaran Pascakonvensional (*Postconventional Reasoning*) . Moralitas individu pada tingkat pascakonvensional (*post reasoning*) menunjukkan kematangan moral individu yang tinggi. Individu dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan kecurangan akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi yang dapat merugikan perusahaan.

H4: Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

D. Kerangka Pemikiran

Model penelitian ini menunjukkan pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Model penelitian ini disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel eksogen dan variabel endogen.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

